



# Gubernur Larang

## Mobdin untuk Mudik

### Tak Masalah Berbeda dengan Kebijakan Menteri PAN-RB

JOGJA - Berbeda dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Crisnandi yang membolehkan mobil dinas (mobdin) untuk mudik, Gubernur DIJ HB X mengisyaratkan sebaliknya. Meski hingga saat ini belum melakukan pertemuan membahas hal itu, menurut gubernur

peraturannya tidak jauh beda dari sebelumnya.

"Saya seperti biasanya saja, saya tidak pernah mengizinkan (mobdin) untuk mudik," tegas Gubernur HB X kemarin (26/6). HB X mengatakan, selama dirinya menjabat gubernur DIJ belum pernah mengizinkan penggunaan mobdin digunakan untuk mudik.

► Baca Gubernur... Hal 7

### ■ GUBERNUR...

Sambungan dari hal 1

Menurut dia, sesuai fungsinya, mobdin hanya digunakan untuk kegiatan kedinasan. Pria bernama lahir Herjuno Darpito ini mengungkapkan, kebijakan di daerah boleh berbeda dengan kebijakan Menteri PAN-RB. "Itu kan kementerian, Daerah punya haknya sendiri, tidak harus sama

dengan kementerian," ujarnya.

Raja Keraton Jogja ini juga mengakui, sampai saat ini belum melakukan rapat pertemuan dengan jajarannya seputar mobdin yang tidak diperbolehkan untuk mudik. Dalam waktu dekat pihaknya segera bertemu sekaligus mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik. "Saya belum melakukan pertemuan itu," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Arief Noor Hartanto mengungkapkan, mobdin yang dimanfaatkan untuk keperluan di luar urusan perkantoran, menimbulkan respons negatif dari publik. "Kalau untuk mudik, saya rasa akan menimbulkan negative," imbuh Inung, sapaan akrabnya.

Inung mengungkapkan, secara sosio-kultural mobdin yang digunakan untuk mudik kurang

tepat. Untuk itu, ia mendukung pernyataan Gubernur DIJ HB X yang akan melarang penggunaan mobdin untuk mudik, meski berbeda dengan kebijakan Menteri PAN-RB.

"Secara pribadi, kalau diterapkan dalam sosio-kultural tidak elok. Jadi ini bukan soal salah atau benar, tapi soal elok dan tidak elok," papar politisi PAN yang tinggal di Kotagede ini.

### HS Juga Larang Mobdin untuk Mudik

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) enggan untuk membuat aturan khusus penggunaan kendaraan berpelat merah itu untuk mudik Lebaran. "Saya tidak perlu membuat aturan khusus. Yang jelas, kendaraan dinas tidak boleh untuk mudik," tegas HS kemarin (26/6).

Ia mengatakan, kendaraan dinas sudah ada aturannya. Baik sepeda motor maupun mobil. Hanya perlu peningkatan pengawasan agar penggunaan kendaraan dinas ini tak disalahgunakan. "Kalau saya, yang penting tanggungjawabnya. Tanggung jawab menggunakan kendaraan plat merah," tandasnya.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Kris Sarjono Sutejo mengatakan, belum ada instruksi penyusunan aturan khusus untuk mobdin di mudik Lebaran kali ini. Termasuk, ketentuan dari Pemprov DIJ yang telah terlebih dahulu membuat aturan larangan penggunaan mobdin untuk mudik.

"Kami masih menunggu kebijakan pimpinan," katanya.

Kebijakan soal penggunaan kendaraan dinas ini, lanjut Kris, sebenarnya berada di tangan masing-masing pimpinan daerah. Artinya, jika di Kota Jogja, bisa memilik aturan khusus yang berbeda. Makanya, Pemprov DIJ pun berbeda aturannya dengan Menpan RB. Karena, memang diperbolehkan.

"Tahun lalu bebas, tapi disarankan kendaraan operasional tetap di *pool*. Kendaraan jabatan boleh dibawa pulang mudik, tapi untuk tahun ini kami belum menerima instruksi tentang hal itu," tambahnya.

Di Kota Jogja, menurut Kris, yang perlu mendapatkan pengawasan khusus adalah kendaraan operasional. Bukan kendaraan jabatan yang bisa dibawa pulang. Tapi, untuk kendaraan operasional ini, rawan untuk disalahgunakan.

Menurutnya, tak sedikit mobil operasional yang justru digunakan kabid di SKPD tertentu, padahal yang bersangkutan su-

dah mendapatkan kendaraan jabatan berupa sepeda motor. Jumlah kendaraan operasional di tiap SKPD pun tidak sedikit, mencapai 4-5 unit.

Namun, pengguna kendaraan ini belum pasti. Berbeda dengan mobil jabatan yang jelas pengguna dan penanggungjawabnya. "Kalau ada larang, itu mestinya lebih pas diterapkan pada kendaraan operasional," katanya.

Ia menambahkan, pejabat di lingkungan pemkot yang tinggal di luar Kota Jogja memang lumayan banyak. Tapi, jaraknya tidak terlalu jauh, karena masih berada di wilayah sekitar DIJ, seperti Muntilan dan Klaten. "Tidak ada yang sampai harus mudik jauh sekali. Ada satu, tapi sudah sangat jarang," tambahnya.

Dikatakan, hal ini membuat pengawasan lebih mudah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yang sudah berjalan. "Tinggal pengguna kendaraan dinas ini melaporkan khusus jika akan menggunakan kendaraan dinas sampai ke luar daerah," tambah Kris. (pra/eri/laz)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005